

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN
PUBLIK DI INDONESIA**

Oleh :

Raditya Feda Rifandhana, Oktaviani Muliati

Alfinar Firdauz, Rafa Huwaida

Yusuf Eko Nahuddin

Correspondence mail : raditya.feda@unmer.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktif terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel. Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.

Kata Kunci : Partai Politik, Kebijakan Publik, Masyarakat

PENDAHULUAN

Partai politik berperan sebagai poros penting dalam sistem politik demokratis, menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, serta membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Melalui peran mereka dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, partai politik memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan masyarakat yang demokratis dan inklusif.¹ Peran partai politik dalam kebijakan di Indonesia sangat penting dan kompleks, terutama dalam konteks sistem demokrasi yang diterapkan. Partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, mengintegrasikan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan publik.²

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan serta mengaktualisasi haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat. Sementara fungsi partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas untuk dapat selalu menjadikan sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam proses demokrasi, partai politik tidak hanya berperan dalam pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin, tetapi juga sebagai lembaga yang merumuskan dan memperjuangkan kebijakan sesuai dengan kepentingan

¹ BARAKA. 2023. Peran Partai Politik dalam Membentuk Kebijakan Pemerintah. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://baraka.uma.ac.id/partai-politik-memiliki-peran/>

² BARAKA. 2023. Peran Partai Politik dalam Membentuk Kebijakan Pemerintah. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://baraka.uma.ac.id/partai-politik-memiliki-peran/>

masyarakat. Partai politik di Indonesia berfungsi sebagai wadah bagi individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam proses politik. Melalui pemilu, partai politik mengusulkan calon-calon pemimpin yang akan menduduki posisi strategis di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa partai politik berperan dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta sebagai peserta pemilu di berbagai tingkat pemerintahan.

Untuk menjalankan fungsinya, partai politik memerlukan sumber daya yang cukup besar. Pendanaan menjadi aspek krusial karena tanpa dana yang memadai, partai tidak dapat mengorganisasi kegiatan, melakukan kampanye, atau menjangkau pemilih. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa partai politik berhak mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lain seperti iuran anggota dan sumbangan sah. Namun, tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai masih menjadi isu yang perlu diatasi agar partai dapat berfungsi secara efektif. Secara keseluruhan, peran partai politik dalam kebijakan di Indonesia sangat vital untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merepresentasikan suara rakyat tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, partai politik dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran partai politik dalam proses penyusunan kebijakan publik di Indonesia?
2. Apakah keberpihakan partai politik dalam kebijakan publik berdampak positif atau negatif terhadap kepentingan masyarakat umum?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi partai politik dalam mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia?

PEMBAHASAN**Peran Partai Politik Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Publik di Indonesia**

Partai politik menjadi salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi, negara tanpa partai politik belum bisa suatu negara disebut negara demokrasi. Partai politik membutuhkan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih, demi menunjang kebijakan publik yang tepat, baik dengan cara merebutkan kekuasaan atau dengan melakukan intervensi kepada aktor pembuat kebijakan. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak, terutama pemerintah yang diorientasikan pada penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, agar memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.³

Kebijakan publik melibatkan lapisan-lapisan politik administratif dalam proses kebijakan adanya korespondensi politik yang saling terjalin satu sama lainnya, dalam suatu sistem yang terintegrasi. Di dalam sistem politik yang bersifat terbuka, maka proses pembuatan kebijakan publik, secara ideal tentunya dapat melibatkan seluruh komponen dalam sistem politik suatu negara, dengan mengakomodasi semaksimal mungkin harapan, tuntutan dan kepentingan masyarakat banyak (publik). Suatu kebijakan publik umumnya hanya memuat garis-garis besar sutau keputusan atau ketetapan pemerintah. Tentu saja dalam pelaksanaannya, tidak dapat begitu saja dijalankan atau diterapkan, karena belum memuat hal-hal yang rinci dan bersifat teknis dari rumusan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, maka sering diikuti dengan adanya petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaannya, agar semakin mudah dan jelas rambu-rambunya bagi aparatur pelaksana (birokrasi) di lapangan.

Bilamana kebijakan tersebut menyangkut pelayanan publik, maka secara eksternal bahwa kebijakan pelayanan publik yang diberikan haruslah memenuhi

³ Ridwan. (2022). Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies. Vol. 3 No. 1, Hal 69-82

standar tertentu yang sudah ditetapkan, yang intinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan terbaik kepada masyarakat tersebut hendaknya memenuhi kriteria kepuasan dan kualitas layanan (sering disebut sebagai pelayanan prima). Produk keputusan politik dalam suatu negara demokrasi, akan sangat diwarnai oleh peranan aktor-aktor politik sebagai legislator yang menjadi penyambung lidah rakyat. Para aktor politik atau legislator tersebut berjuang dan bekerja di dalam sistem politik melalui keberadaan dan fungsionalisme kepartaian. Budaya politik demokratis dan bersifat partisipatoris menjadi kekuatan politik dari partai-partai politik demokratis yang bekerja, berjuang dan berpikir demi kemajuan masyarakat-bangsa.⁴ Peran partai politik dalam proses penyusunan kebijakan publik di Indonesia sangat signifikan, mengingat partai politik merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran tersebut :

1. Penyalur Aspirasi Masyarakat

Partai politik berfungsi sebagai saluran penyaluran aspirasi politik masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berperan dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.⁵

2. Proses Perumusan Kebijakan

Dalam konteks perumusan kebijakan, partai politik terlibat langsung melalui kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Mereka berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang akan

⁴ Iskandar D Junaedi. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 14 No. 1, Hal 17-35

⁵ Ridwan. (2022). Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. *PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies*. Vol. 3 No. 1, Hal 69-82

dilaksanakan oleh pemerintah. Proses ini melibatkan interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, di mana partai politik menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

3. Fungsi Legislasi dan Pengawasan

Partai politik juga memiliki fungsi legislasi yang penting dalam penyusunan undang-undang dan peraturan daerah. Namun, seringkali fungsi ini terabaikan dibandingkan dengan fungsi pengawasan dan anggaran. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat peran legislatif partai politik agar lebih fokus pada pembuatan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan aspirasi masyarakat.⁶

4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun partai politik memiliki peran penting, terdapat tantangan dalam implementasinya. Misalnya, kekuatan partai yang terlalu dominan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Fraksi-fraksi di DPR sering kali lebih mewakili kepentingan partai daripada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada reformasi internal dalam partai untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan suara rakyat.

5. Keterlibatan Rakyat

Rakyat sebagai subjek dalam sistem demokrasi memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan melalui mekanisme representatif. Partai politik harus memastikan bahwa aspirasi rakyat menjadi agenda utama dalam pembuatan kebijakan publik agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, peran partai politik dalam

⁶ Anggono B Dwi. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16 No. 4, Hal 695-720

penyusunan kebijakan publik di Indonesia adalah krusial, namun perlu adanya penguatan sistem internal dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.⁷

Dampak Keberpihakan Partai Politik Dalam Kebijakan Publik Terhadap Kepentingan Masyarakat Umum

Terdapat banyak dampak positif dari partisipasi politik seperti meningkatkan kesadaran politik, memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dalam kebijakan publik dan memperkuat demokrasi. Selain itu partisipasi politik juga dapat membantu meningkatkan partisipasi pada masyarakat dalam proses politik. Dan memperkuat hubungan antara warga negara dan pemerintah namun partisipasi politik juga dapat memiliki dampak negatif dan konflik sosial.⁸ Keberpihakan partai politik dalam kebijakan publik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat umum. Partai politik yang berpihak pada kepentingan rakyat cenderung menghasilkan kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan, (Undang-Undang No. 2 Tahun 2011: Mengatur keberadaan dan fungsi partai politik, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pendidikan politik dan penciptaan iklim politik yang kondusif untuk partisipasi masyarakat).⁹ Partai politik juga berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, mereka berperan dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik, yang merupakan langkah penting dalam proses demokrasi.

⁷ Ridwan. (2022). Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. *PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies*. Vol. 3 No. 1, Hal 69-82

⁸ Nurhasidah. 2023. OPINI : *Pentingnya Partisipasi Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik*. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-pentingnya-partisipasi-politik.html?m=1>

⁹ Intiniyo P . (2016) Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU. No. 2 Tahun 2011. Vol. 4 No. 3, Hal 27-34

Selain dampak positif, keberpihakan partai politik terhadap kebijakan pemerintah terkadang juga menimbulkan efek negatif pada kepentingan masyarakat. Dampak negatif dalam partisipasi politik dapat meliputi polarisasi politik dan konflik sosial.¹⁰ Keberpihakan yang kuat dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana kelompok-kelompok terpecah menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Hal ini dapat meningkatkan konflik sosial, mengurangi kerukunan, dan menciptakan ketegangan di antara masyarakat.¹¹ Selain itu, partisipasi politik yang berlebihan dapat mengarah pada kelelahan politik dan ketidak puasan terhadap sistem politik. Ketika partai politik terlalu berpihak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi politik dapat menurun. Masyarakat mungkin merasa bahwa kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan umum, tetapi lebih kepada agenda politik tertentu. Sebagai contoh pada kasus Rafel Alun Trisambodo mantan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Selama menjabat, Rafael diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak sebesar US\$90.000 atau sekitar Rp1,35 miliar.¹² Akibat dari contoh kasus tersebut banyak masyarakat yang tidak mempercayai kinerja badan perpajakan sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan masyarakat dalam pelaporan wajib pajak atau pembayaran pajak.

¹⁰ Nurhasidah. 2023. OPINI : *Pentingnya Partisipasi Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik*. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-pentingnya-partisipasi-politik.html?m=1>

¹¹ Muhammad Irfan. *Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/polarisasi-politik-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat>

¹² CNN Indonesia. 2023. *KPK: Rafael Alun Diduga Terima Gratifikasi Rp1,3 Miliar Terkait Pajak*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230403173709-12-933025/kpk-rafael-alun-diduga-terima-gratifikasi-rp13-miliar-terkait-pajak>

Tantangan Yang Dihadapi Partai Politik Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik di Indonesia

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, partai politik tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan integritas mereka:

1. Korupsi dan Nepotisme: Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi partai politik adalah masalah korupsi dan nepotisme. Banyak partai politik terjerat dalam praktik-praktik koruptif, baik dalam penggalangan dana kampanye, penyusunan daftar calon legislatif, maupun dalam penetapan kebijakan. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan melemahkan legitimasi mereka.
2. Pendanaan Politik: Keterbatasan sumber daya finansial menjadi tantangan besar bagi partai politik, terutama partai-partai kecil. Ketergantungan pada donatur besar dapat menyebabkan konflik kepentingan dan mempengaruhi kebijakan yang diusung oleh partai tersebut. Kurangnya transparansi dalam pendanaan politik juga menimbulkan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Polarisasi Politik: Meningkatnya polarisasi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, menjadi tantangan lain yang dihadapi partai politik. Polarisasi ini sering kali diperburuk oleh retorika yang divisif dan manipulasi informasi di media sosial, yang pada akhirnya memperparah perpecahan di masyarakat.
4. Fragmentasi dan Koalisi yang Rentan: Sistem multipartai di Indonesia dan banyak negara lain menciptakan tantangan tersendiri, yaitu fragmentasi politik yang tinggi. Partai-partai kecil sering kali membentuk koalisi yang rentan dan tidak stabil, yang dapat menyebabkan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan politik.
5. Krisis Kepercayaan Publik: Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik menjadi tantangan serius. Krisis kepercayaan ini sering kali disebabkan oleh janji-janji politik yang tidak terealisasi, ketidakkonsistenan antara retorika dan tindakan, serta skandal-skandal

politik yang melibatkan tokoh-tokoh partai.¹³ Kegagalan terus-menerus dalam program publik untuk meringankan penderitaan masyarakat merupakan hilangnya motivasi untuk mempercayai pemimpin dan menunjukkan perilaku patriotik. Kegagalan kebijakan publik menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan sikap apatis masyarakat terhadap isu-isu yang melibatkan pemerintah. Hal ini terlihat dari sikap apatis, ekstremisme, dan kefanatikan pemilih. Hilangnya kepercayaan secara luas berarti terkikisnya legitimasi. Inilah yang ingin dihindari oleh pemerintah mana pun. Hilangnya legitimasi dapat menyebabkan kerusuhan berdarah, revolusi, hilangnya nyawa dan harta benda, serta pelanggaran hukum dan ketertiban secara umum.¹⁴

KESIMPULAN

Partai politik menjadi salah satu kelengkapan umum dari negara demokrasi, negara tanpa partai politik belum bisa suatu negara disebut negara demokrasi. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak terutama pemerintah yang di orientasikan pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, agar memungkinkan pencapaian tujuan tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Peran partai politik dalam proses penyusunan kebijakan publik di Indonesia sangat signifikan seperti penyalur aspirasi masyarakat, proses perumusan kebijakan, fungsi legislasi dan pengawasan, tantangan dan implementasi kebijakan, serta keterlibatan rakyat.

Terdapat banyak dampak positif dari partisipasi politik seperti meningkatkan kesadaran politik, memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dalam kebijakan publik dan memperkuat demokrasi. Partai politik yang

¹³ Asep Tapipi Yani. 2024. *Peran Partai Politik, Tantangan, Harapan dan Kenyataan*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://teropongindonesian.com/2024/08/16/peran-partai-politik-tantangan-harapan-kenyataan/>

¹⁴ Kristian I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 21 No. 2, Hal 88-98

berpihak pada kepentingan rakyat cenderung menghasilkan kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan. Selain dampak positif, keberpihakan partai politik terhadap kebijakan pemerintah terkadang juga menimbulkan efek negatif pada kepentingan masyarakat. Dampak negatif dalam partisipasi politik dapat meliputi polarisasi politik dan konflik sosial. Selain itu partisipasi politik yang berlebihan dapat mengarah pada kelelahan politik dan ketidakpuasan terhadap sistem politik. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, partai politik tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan integritas mereka seperti korupsi dan nepotisme, pendanaan politik, polarisasi politik, fragmentasi dan koalisi yang rentan, serta krisis kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Anggono B Dwi. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16 No. 4, Hal 695-720

Anugrah Dwi. 2023. *Peran Partai Politik Dalam Sistem Politik*. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://fisip.umsu.ac.id/peran-partai-politik-di-indonesia/>

Arga Imawan. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://elok.ugm.ac.id/course/info.php?id=12572>

Asep Tapihi Yani. 2024. *Peran Partai Politik, Tantangan, Harapan dan Kenyataan*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://teropongindonesian.com/2024/08/16/peran-partai-politik-tantangan-harapan-kenyataan/>

BARAKA. 2023. *Peran Partai Politik dalam Membentuk Kebijakan Pemerintah*. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://baraka.uma.ac.id/partai-politik-memiliki-peran/>

CNN Indonesia. 2023. *KPK: Rafael Alun Diduga Terima Gratifikasi Rp1,3 Miliar Terkait Pajak*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230403173709-12-933025/kpk-rafael-alun-diduga-terima-gratifikasi-rp13-miliar-terkait-pajak>

Intiniyo P . (2016) Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU. No. 2 Tahun 2011. Vol. 4 No. 3, Hal 27-34

Iskandar D Junaedi. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 14 No. 1, Hal 17-35

Kristian I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 21 No. 2, Hal 88-98

Muhammad Irfan. *Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/polarisasi-politik-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat>

Nurhasidah. 2023. OPINI : Pentingnya Partisipasi Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-pentingnya-partisipasi-politik.html?m=1>

PMB UNJANI. 2024. *Waspada Terhadap Kampanye Negatif Dalam Persaingan Pilkada di Daerah*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://pmb.unjani.ac.id/waspada-terhadap-kampanye-negatif-dalam-persaingan-pilkada-di-daerah/>

Ridwan. (2022). Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. *PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies*. Vol. 3 No. 1, Hal 69-82

Shafa Aulia Nursani. 2023. *Polarisasi Politik adalah Saat Pandangan Masyarakat Terbelah, Dampaknya?*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6786714/polarisasi-politik-adalah-saat-pandangan-masyarakat-terbelah-dampaknya>